

# MENGUKUR TINGKAT KEMANDIRIAN KABUPATEN DI BALI DALAM OTONOMI DAERAH

*I Ketut Sukayasa<sup>1)</sup>, I Nyoman Sugiarta<sup>2)</sup>*

<sup>1)</sup> Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Jurusan Akunansi Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Telp. +62 0361 70981 ext. 196

E-mail: n.sugiarta@yahoo.com

## ABSTRACT

*This article describes the independence District in Bali in the Autonomous areas, in accordance with Act No. 32/2004: revision of Act No. 22/1999 and Act No. 33/2004: revision of Act No. 25/1999.*

*From the results of measuring the District Decentralization degree movies in Bali, showed the Badung Regency 76,66%, Kodya Denpasar, Gianyar 21,45 40,12%%, Buleleng, Tabanan 33,80% 18.02%, Jembrana 7.61%, Karangasem, Klungkung 14,84% 7,91%, Bangli 19.97%. From the level of independence of Badung, Denpasar Kodya 16% 51% 53%, Gianyar, Tabanan Jembrana, 59% 64% 69% of Karangasem, Klungkung, 83%, Bangli 80, Buleleng and 72%. From the results of the discussion, only three districts in Bali welcomes autonomous region i.e. Badung Regency, Gianyar, and Kodya Denpasar.*

**Keyword : independence, autonomous**

## 1.PENDAHULUAN

Berembusnya era reformasi, maka orientasi pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih transparan dari era sebelumnya. Ini semua tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang semakin deras untuk memperoleh informasi yang tingkat validitasnya lebih dapat dipercaya. Kalau kita perhatikan dimana selama era pra reformasi/Orba, pengelolaan keuangan negara terkesan tidak transparan/sangat tertutup, dimana hanya kalangan terbatas saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Iklim/keadaan yang tidak kondusif ini tentu banyak mengandung sisi buruk/negatif, karena peran masyarakat sebagai subyek pengawas pelaksanaan anggaran negara secara langsung tidak berfungsi secara semestinya, sehingga laporan pertanggungjawabannya kurang dianggap kavelabel.

Untuk itu lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah, Nomor 32/Tahun 2004 hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 22/Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 33/Tahun 2004, hasil revisi Undang-Undang Nomor 25/Tahun 1999, yang mengatur tentang tata kelola leuangan, dan pemerintahan daerah, yang lebih memberdayakan keberadaan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi daerah ini, diharapkan kemandirian daerah dari aspek keuangan dan pemerintahan lebih dapat terjamin. Untuk itu diperlukan/dituntut adanya sumber daya manusia yang memadai agar Otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik.

Dimaksud dengan otonomi daerah disini adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian ( desentralisasi ). Sementara keadaan tuntutan dari pihak ekteren/di luar negeri menunjukkan semakin maraknya tuntutan globalisasi yang mengharuskan daya saing tiap

negara ( termasuk pemerintah daerahnya ) semakin meningkat/transparan. Undang-Undang Nomor 33/Tahun2004, tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi iklim terjadinya perubahan yang cukup signifikan/mendasar dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Bagaimana perubahan manajemen keuangan daerah pada era pra dan pasca reformasi memberi angin segar atas pengelolaan keuangan daerah lebih otonom/mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32/Tahun 2004 mengatur tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana antar Pemerintahan Daerah harus diatur secara adil dan selaras. Adanya perimbangan proporsi pembagian yang adil dalam pengelolaan kekayaan daerah antara pemerintah pusat dengan dengan pemerintah daerah akan sangat memberi arah pengembangan manajemen kuangan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang memadai/baik, maka dianggap perlu untuk penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berupa system keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, yang jelas antarsusunan pemerintah.

Seiring berjalanya waktu, tuntutan otonomi daerah baik untuk tingkat satu (provinsi) maupun tingkat dua ( kabupaten) semakin gencar/deras, sering tidak diikuti dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang ada. Dari sekitar 435 kabupaten yang ada di Indonesia hampir 65 persen belum dapat mandiri dari aspek keuangan. Kita bisa belajar dari kasus di Bali, dimana dari 8 (delapan) kabupaten dan 1( satu) kodya sebagian besar belum dapat mandiri dari aspek keuangan. Kuatnya ketergantungan dari bantuan pusat ( APBN), memberi dampak pada laju pembangunan yang tidak seimbang antara satu daerah. Besarnya belanja tidak langsung ( rutin) dari belanja langsung ( investasi/modal ) memberi dampak pada rendahnya pembangunan phisik yang ada. Kalau kita perhatikan APBD kabupaten/kodya yang ada di Bali, seperti di bawah ini.

**Tabel : 1**  
**Besarnya APBD Kabupaten di Bali Tahun : 2013**

No.	Keterangan	Jumlah ( Rp )
1	Kota Denpasar	1.278.780.312.587,10
2.	Badung	2.718.030.317.564'00
3.	Gianyar	1.112.299.413.443,81
4.	Tabanan	1.214.809.607.696,63
5.	Jembrana	720.054.950.643,58
6	Karangasem	837.759.325.894,99
7.	Klungkung	613.644.988.615,36
8.	Bangli	567.249.437.222,10
9.	Buleleng	1.263.598.215.936,00

**Sumber : BPS. Bali.**

## 2. METODE PENELITIAN.

Untuk dapat mengukur tingkat kemandirian kabupaten yang ada di Bali, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah

daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Adapun rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**b. Derajat Desentralisasi.**

Derajat Desentralisasi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Pulau Bali dengan luas .... yang terdiri dari delapan kabupaten, dan satu kota madya, perlu diukur tingkat kemandirian dan derajat desentralisasinya. Langkah ini perlu dilakukan ditengah gencarnya eforia pemekaran daerah yang ada di tanah air. Kabupaten di Bali perlu pula introspeksi diri atas keberadaanya dalam membangun kemandirianya agar tidak keasyikan menetek ke pusat ( APBN), tanpa ada upaya terobosan mendasar yang berarti meningkatkan PAD.

Kalau kita analisis dari aspek kemandirian kabupaten/kodya yang ada di Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel : 2**  
**Tingkat Kemandirian Kabupaten di Bali Tahun 2013**

No	Keterangan	APBD Tahun 2013	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah.	Rasio Kemandirian. (%)
1	KdDenpasar	1.278.780.312.587,10	656.582.041.300	1.278.760.312.567	51
2.	Badung	2.718.030.317.564*00	435.119.695.367	2.718.030.317.564	16
3.	Gianyar	1.112.299.413.443,81	592.077.460.550	974.869.151.692	53
4.	Tabanan	1.214.809.607.696,63	712.765.792.455	1.124.809.607.696,	59
5	Jembrana	720.054.950.643,62	457.498.290.651	720.054.950.643	64
6.	Karangasem	837.759.325.894,99	576.383.960.822	837.759.325.894	69
7.	Klungkung	613.644.988.615,36	507.661.414.919	613.644.988.615	83
8.	Bangli	556.485.160.196,08	453.987.420.995	556.485.160.196.	80
9.	Buleleng	1.263.598.215.936,00	905.820.623.176	1.263.598.215.936	72

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka dari 8 ( delapan ) kabupaten dan satu Kodya yang ada di Bali, Kabupaten Badung yang paling rendah tingkat ketergantunganya ( 16 % ), sementara kabupaten yang paling tinggi tingkat ketergantunganya adalah Kabupaten Klungkung ( 83%), diikuti dengan Kabupaten Bangli (80%), Kabupaten Buleleng ( 72%), Kabupaten Karangasem ( 69%), Jembrana ( 64%). Untuk Kabupaten/Kodya yang keberadaan ketergantunganya masih fifty-fifty seperti Kodya Denpasar (51%), Kabupaten Gianyar (53%) dan Kabupaten Tabanan (59%). Keadaan rasio ketergantungan kabupaten yang ada di Bali dengan bantuan

keuangan dari pemerintah pusat ( APBN), mencerminkan keberadaan otonomi daerah yang sudah berlangsung hampir 14 tahun, belum berhasil secara umum.

Ini dapat dicerminkan masih cukup besar Kabupaten di Bali tingkat ketergantungan dari bantuan/dana pusat ( APBN). Keadaan yang tidak kondusif ini mencerminkan otonomi daerah tidak memberikan kemandirian keuangan daerah secara utuh, walau otoritas pengembangan daerah telah diberi peluang yang lebih luas.

Untuk mengukur tingkat/derajat kemandirian suatu kabupaten, dimana adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Dalam mengukur tingkat/derajat kemandirian suatu daerah/kabupaten maka ada skala yang harus diperhatikan sebagai pedoman.

Menurut Tim Penelitian Fisipol Universitas Gajah Mada dalam mengukur derajat kemandirian suatu daerah ada 6(enam) skala yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

**Tabel : 3**  
**Skala Interval Derajat Desentralisasi**

No.	Prosentase ( % )	Kemampuan Keuangan daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Cukup
4	30,01-40,00	Sedang
5	40,01-50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Kalau kita analisis dari tingkat/derajat desentralisasi Kabupaten/Kodya atas keberadaan APBD masing kabupaten yang ada di Bali menunjukkan keadaan sebagai berikut:

**Tabel : 4**  
**Tingkat/Derajat Desentralisasi Kabupaten di Bali Tahun 2013**

No.	Keterangan	APBD Tahun 2013	Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keu. Daerah
1	Kd Denpasar	1.278.780.312.587,10	513.061.591.494	1.278.760.312.567	40,12	Sedang
2.	Badung	2.718.030.317.564'00	2.029.161.138232	2.718.030.317.564	74,66	Sangat Baik
3.	Gianyar	1.112.299.413.443,81	238.558.925.399	1.112.299.413.443	21,45	Cukup
4.	Tabanan	1.214.809.607.696,63	202.741.692.547	1.124.809.607.696,	18,02	Kurang
5	Jembrana	720.054.950643,58	54.775.108.621	720.054.950.643	7,61	Sangat Kurang.
6.	Karangasem	837.759.325.894,99	124.305.929.989	837.759.325.894	14,84	Kurang
7.	Klungkung	613.644.988.615,36	48.541.694.305	613.644.988.615	7,91	Sangat Kurang
8.	Bangli	567.249.437.222,10	113.262.016.227	567.249.437.222	19,97	Kurang
9.	Buleleng	1.263.598.215.936,00	365.777.591.760	1.263.598.215.936	33,80	Cukup

Kalau kita analisis dari aspek derajat kemandirian kabupaten yang ada di Bali dimana yang paling siap adalah Kabupaten Badung dengan predikat Sangat Baik ( 74,66 % ), Kodya Denpasar dengan predikat Sedang ( 40,12% ), untuk Kabupaten Gianyar dengan predikat Cukup ( 21,45%), Kabupaten Buleleng cukup ( 20,40%), Kabupaten Tabanan Kurang (18,02%), sedangkan untuk kabupaten yang lain sangat kurang, seperti Kabupaten Bangli ( 19,97% ), Kabupaten Jembrana sangat kurang (8,99%), Kabupaten Klungkung sangat kurang ( 7,91%).

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan tersebut di atas, dimana dalam otonomi daerah untuk kabupaten/kodya yang ada di Bali, kalau dikaji dari aspek tingkat kemandirian dan derajat desentralisasi, dimana Kabupaten Badung, dengan predikat yang paling siap diikuti oleh Kodya Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten yang lain masih tinggi tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat seperti Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, Jembrana, dan Tabanan.

Untuk kabupaten yang masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat, perlu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang ada. Disamping itu perlu pula mulai dipikirkan oleh stakeholder, dimana untuk pemerintah yang tingkat ketergantungannya cukup tinggi dengan pemerintah pusat dalam kurun waktu yang lama dalam otonomi daerah ini melakukan upaya merger( penggabungan ) kabupaten untuk dapat menekan Belanja Tidak Langsung ( Belanja Rutin), sehingga Belanja Langsung ( Belanja Pembangunan) dapat lebih besar, sehingga dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR FUSTAKA**

- Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, BPFE Yogyakarta Tahun 2001.  
Bastian Indra. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. BPFE Yogyakarta. Tahun 2001  
H. Kusnadi. HMA, dkk. Akuntansi Pemerintahan( Publik ). Penerbit Unibraw Malang. Tahun 2002.  
Baldric Siregar, Bonni Siregar, Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Penerbit STIE YKPN. Tahun 1996.  
Halim Abdul Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba empat, Jakarta Tahun 2001  
Mamesah. Administrasi Keuangan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Tahun 1995.  
Wijaya Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Jakarta. Tahun 2002..  
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik Andi Yogyakarta. Tahun 2002.

Lampiran : 1

**Tabel : 5**  
**Pemerintahan Kabupaten Di Bali**  
**Ringkasan Penjabaran APBD**  
**Tahun Anggaran : 2013**

No	Keterangan	Kab. Badung	Kodya Denpasar	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Tabanan
A.	PENDAPATAN	<b>2718030.317564</b>	<b>1278760312587</b>	<b>1112299413443</b>	693772159187	<b>1214809607696</b>
1.	PAD.					
	a.Pajak	1828670033760	403000000000	156458722970	18512225000	61408398250
	b.Restibusi	73110899131	38079489000	27546295886	8306800000	34935650300
	c.Peng Kekayaan Daer	71350280431	15325102494	5339119015	2850000000	8046089498
	d.Lain PAD	56029925000	56675000000	49214787527	25106083621	98351554498
2.	Dn Perimbangan					
	a.Bagi hasil pajak	61933512367	64982449300	29420424052	15274007353	22606426576
	b.DAU	372625383000	580807702000	609293266000	450919726000	663156595000
	c.DAK	560800000	10791890000	45158740000	45403270000	48921470000
3.	Lain2PAD yg sah					
	a.Dana Bagi Hasil Pr	106795685438	100529182792	69626816991	72868021213	109326252573
	b.Dn Penys. Otsus	113491184000	-	116634566000	51680144000	146900369000
	d.Bantuan Keu Prov	2909325000	6898985000	3606675000	2851882000	21156802000
	e.Dana Insentif D	28958182000	-	-	-	-
	f. Pengembali JKM	1595107526	-	-	-	-
	g. Hibah	-	26665000000	-	-	-
B.	BELANJA	<b>3027775911367</b>	<b>1353987822716</b>	<b>1156799413443</b>	720054950643	<b>1252899104448</b>
1.	B. Tdk. Langsung.	<b>1623136935493</b>	661132514505	765204605187	439268855591	841575489695
	a.B Pegawai	977496630366	579045202745	670620249769	-	-
	b.B.Subsidi	209000000	-	2872920000	-	-
	c.B.Hibah	96874582650	26665000000	23053300000	12410654174	35241000000
	d.B.Bantuan Sosial	57501750000	162500000	8475000000	3410000000	6000000000
	e.B.Bagi Hasil Prov	219855161334	19187618085	25612785431	37383652762	6299797833
	f.B.Bantuan Keu Prov.	255465191344	35072193675	34270349987	-	68078588554
	g.B. Tdk Terduga	13853619797	1000000000	3000000000	5000000000	3580979586
	h.B. Bunga	-	-	-	-	100000000
2.	B. Langsung.	1404638975874	692855308211	391594808256	280786095052	411323614753
	a.B. Pegawai	79788831923	54688927423	32164234598	35019951159	14589221910
	b.B.Barang dan Jasa	473202533790	388506768597	176459356639	11988595306	256806846304
	c.B.Modal	851647610161	249659612191	182971217019	12588019048	139927546539
	SURPLUS/DEFISIT	<b>(309745593802)</b>	<b>(75227510129)</b>	<b>(44500000000)</b>	<b>26282791456)</b>	<b>(38089496752)</b>
C.	PEMBIAY DAERAH.		75227510129	-	-	-
1.	Penerimaan Pemb D.	901461570467	89979712831	50000000000	35679791456	38089496752
	a.Silpa.	901461570467	89979712831	50000000000	29482791456	43369496752
2.	b.Penerimaan Dn. Tal.	-	-	-	5200000000	-
	c. Pen. Dana Bergulir	-	-	-	9970000000	-
	Pengeluaran Pemb D.	214000000000	14752202702	55000000000	93970000000	52800000000
	a.Penyertaan Modal	214000000000	14752202702	55000000000	-	52000000000
	b.Pemb. Pokok	-	-	-	-	800000000
	Hutang	687461570467	75227510129	44500000000	26282791456	38089496752
	Pembiayaan Netto	<b>377715976664</b>	0	0	0	0
	Silpa Tahun Berkenan					

Sumber : BPS Bali.

Lampiran : 2

**Tabel : 6**  
**Pemerintahan Kabupaten Di Bali**  
**Ringkasan Penjabaran APBD**  
**Tahun Anggaran : 2013.**

No	Keterangan	Kab. Klungkung	Kab. Bangli	Kab. Karangasem
A.	PENDAPATAN	<b>613.644.988.615</b>	<b>567.249.437.222</b>	<b>837.759.325.894</b>
1.	PAD.			
	a.Pajak	48.541.694.305	5.793.609.396	77.627.801.000
	b.Restibusi	7.020.495.899	12.486.918.000	7.247.980.000
	c.Peng Kekayaan Daer	1.257.512.745	2.500.000.000	11.097.107.887
	d.Lain PAD yg sah	5.963.549.625	10.219472.604	28.333.041.102
2.	Dn Perimbamban			
	a.Bagi hasil pajak	19.775.715.919	18.785.257.995	26.590.370.822
	b.DAU	444.174.019.000	396.942.913.000	503.028.930.000
	c.DAK	43.711.680.000	38.259.250.000	46.764.660.000
3.	Lain2PAD yg sah			
	a.Dana Bagi Hasil Pr	55.231.304.390	49.137.935.027	55.313.093.215
	b.Dn Penys. Otsus	-	27.452.881.200	54.485.573.360
	d.Bantuan Keu Prov	2.210.575.000	-	26.840.768.508
	e.Dana Insentif D	-	-	-
	f. Sumbangan Pihak k3	-	-	10.000.000
	g. Hibah	-	-	420.000.000
B.	BELANJA	<b>647.135.362.151</b>	<b>596.749.437.222</b>	984.323.383.475
1.	B. Tdk. Langsung.			
	a.B Pegawai	357.658.271.599	354.484.439.924	522.732.626.450
	b.B.Subsidi	-	165.000.000	-
	c.B.Hibah	46.543.175.834	8.014.350.400	29.627.784.200
	d.B.Bantuan Sosial	551.000.000	767.900.000	195.000.000
	e.B.Bagi Hasil Prov	2.519.352.420	1.828.052.739	11.386.770.100
	f.B.Bantuan Keu Prov.	24.976.809.186	38.340.309.652	35.755.579.453.
	g.B. Tdk Terduga	1.000.000.000	1.253.758.000	2.700.000.000
	h.B. Bunga	-	-	1.165.000.000
2.	B. Langsung.			
	a.B. Pegawai	17.420.900.905	18.608.572.350	14.377.492.910
	b.B.Barang dan Jasa	113.565.925.518	89.481.278.921	138.501.985.237
	c.B.Modal	82.895.926.688	83.805.783.234	227.881.145.12
	SURPLUS/DEFISIT	<b>(33.490.373.536)</b>	<b>(29.500.000.000)</b>	<b>(146.564.057.580)</b>
C.	PEMBIAIY DAERAH.			
1.	Penerimaan Pemb D.			
	a.Silpa.	37.535.373.536	30.000.000.000	48.167.684.891
2.	b.Pene Kemb. Modal	1.205.000.000	-	-
	c.Pencairan dn. cad	-	-	5.357.333.000
	d. Pinjaman Daer&Obl	-	-	98.000.000.000
	Pengeluaran Pemb D.			
	a.Penyertaan Modal	5.250.000.000	500.000.000	3.847.107.887
	b.Pemb. Pokok Hutang	-	-	800.872.920
	c.Pembt. dn. cadangan	-	-	312.979.502
	Pembiayaan Netto	33.490.373.563	-	-